**ARTIKEL**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN**

**DANA DESA DI WILAYAH KECAMATAN JATISARI KABUPATEN KARAWANG**

JUM JUM JUMENA

188010020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK**

 **UNIVERSITAS PASUNDAN**

**Abstrak**

Pemerintah Desa sebagai lapisan pemerintah yang paling bawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efektif. dan membuat perencanaan pembangunan yang baik sesuai dengan kondisi dan Kebutuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa. Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintahan desa adalah rendahnya kemampuan desa dalam membiayai kegiatan penyelenggaaraannya. Untuk itu bantuan keuangan merupakan salah satu bagian dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman. partisipasi, otonomi asli. demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur mulai tahun 2007 telah melaksanakan kegiatan Dana Desa (DD). bantuan DD ini mempunyai empat tujuan yaitu pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. kedua, mcningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara panisipatif sesuai dengan potensi desa, ketiga, meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. dan keempat. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauhmana implementasi kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh pelaksana DD di Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang, serta tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa di Wilayah Kecamatan Jatisari Kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administrasi publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama, atau masalah pribadi atau golongan yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh rnasyarakat di daerah itu. (.Nugroho D, 2006:23-25). Implementasi kebijakan ukuran keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan sebagian besar ditentukan dari implcmentasi kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Nugroho (2008: 501): rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60% sisanya, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Menurut Edward III (1980) dalam Nugroho (2008:447), menegaskan bahwa tanpa implementasi efektif keputusan dari pembuat kebijaksanaan tidak akan diselesaikan dengan sukses) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang studi aspek lingkungan sosial tennasuk manusia didalamnya. lnforman dalam penelitian ini adalah para pelaksana DD.

Dan aspek-aspek implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah aspek Komunikasi, Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi serta teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. sumber data yang digunakan ialah data primer dan sckunder, instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah model matriks untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, berdasarkan data yang ada, penulis berupaya mendiskripsikan/menigambarkan secara sistematis. factual pan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada dan teori yang digunakan. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif. Dalarn implementasi kebijakan DD di kecamatan Jatisari, fenomena pencapaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. ini terlihat dari rendahnya kontribusi PADes yaitu 7.36 %, dan dana DD 59,75 %, swadaya gotong royong memberikan kontribusi 0.67% dan kontribusi dari dana partsipasi masyarakat 1 ,04%. Dari fenomena belum tercapainya pencapaian tujuan DD basil analisis dari aspek komunikasi disimpulkan bahwa aspek komunikasi cukup efektif, aspek sumberdaya kurang efektif dan aspek sikap pelaksana kurang efektif. serta aspek struktur organisasi belum berjalan efektif.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa, Dana Desa

**ABSTRACT**

*The village government as the bottom layer of government that directly deal with the public are required to conduct effective governance, and create a good development plan in accordance with the-conditions and needs of the community with the participation of rural communities .. The basic problems facing the village government is the low ability to finance penyelenggaaraannya village. For that financial aici is one part of the realization of the right to organize village autonomy in order to grow and develop to follow the growth of the village itself is based on diversity, participation, genuine autonomy, democratization and empowerment. Government of Karawang started in 2007 has been conducting the Village Fund (DD), DD this aid has four objectives: first. improving rural governance and community development appropriate authorities, second. increasing the ability of an association of villages in the planning. implementation and pat1icipatory pembagunan control in accordance with the potential of the village, third, improving income distribution, employment and business opportunities for rural communities, and the fourth, encourage self-help mutual aid society.*

 *The method used in this research is descriptive qualitative case study research design. The case study is a form of in-depth research on the environmental aspects of social studies, including human therein. Informants in this study is the executor of DD.*

*And aspects of policy implementation in this research is the aspect of Communication, Resources. Executive attitude, Bureaucratic Structure and techniques of data collection is interview, documentation and observation, the source of the data used is primary and secondary data, the instrument used in the study is the model matrix to facilitate researchers in collecting the data, based on existing data, the authors attempt to describe I illustrate a systematic, factual and accurate information on the facts, properties and relations existing between phenomena rind theories used. Data were analyzed using an interactive analysis techniques. In policy implementation in the district ADD Kana tang, phenomena achievement of policy objectives have not been fully achieved, is evident from the low contribution ofPades is 7.36%. and 59.75% DD funds, mutual aid self-help contribute 0.67% of the fund's participation and contribution communitie\_s 1.04%. Of the phenomenon of not achieving the goal achievement of DD on the analysis of the communication aspect is concluded that the communication aspect is quite effective, less effective resource aspects and aspects of executive attitudes are less effective, as well as aspects of organizational structure has not been effective.*

***Keywords: Policy, Implementation. Development, Village Fund***

**DAFTAR PUSTAKA**

Bewa Ragawino, S.H., M.Sl. 2005. Sistem Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Padjadjaran

Chalid Pheni. 2010. Teori danlsu Pembangunan. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka

Dunn, William N. 2000. Pengantar Ana/isis Kebij"akan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

eJournal Pemerintahan lntegratif, 2013. I (I): 51-641SSN 0000-0000. ejournal.pin.or.id © Copyright 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Elu Wilfridus B, Purwanto Agus Joko. 2011. Inovasi dan Perubahan organisasi. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka

Fagance. Michael. Citizen Participation in Planning. 1977. Australia. Pergamon Press Fokus Media. 2008. Pemerintahan De.sa dan Kelurahan. Himpunan Peraturan Perundang~undangan.

HanifNurcholish, Enceng, Zainullttihad Amin. 2009. Adminisrrasi Pemerinlah Daerah. Penerbit Universitas Terbuka

Hartanto Mardi Frans. 2008. Paradigma Baru Manajemen Indonesia. Penerbit Mizan

lg. Wursanto. 2002. Dasar~dasar llmu Organisasi. Jakarta. Penerbit Andi

Ikhsan M, Santoso Agus, Harmanti. 201 1. Administrasi Keuangan Publik. Jakarta Penerbit Universitas Terbuka.

Iswanto Yun. 2005. Manajemen Sumber Daya Xfwwsiu. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka

Kismartini, dkk. 2012. Anal isis Kebijakan Publik. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka

Moleong, Lexy. 2001. .Metodologi Penelitian Kualilatif. Bandung. Penerbit PT Remaja Rosdakarya.

Mubiyarto. 1994, Tipologi Desa Tertinggal

Nasir, Moh. 1983. A1etode Penelitian. Jakarta.Ghalia Indonesia.

Nasution S.Metodee Research. 2003. Jakarta. Bumi Aksara

Nugroho R. Public Policy. 2008. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo

Prasojo, Eko, dkk. 2010. Pemerintahan Daerah. Jakarta. Universitas Terbuka

Rasyid Ryas, Muh. 2000. A1akna Pemerintahan. Jakarta. PT. Mutiara Sumber Widya

Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi, Struktur. Desain & Aplikasi. Jakarta. Penerbit Arcan

Sadhana, Kridawati. 2011. Realitas Kebijakan Publik. Malang. Pencrbit Universitas Negeri Malang

Sedarrnayanti Hj. 2004. Good Governance. Bandung. Penerbit Mandar Maju Sundarso, dkk. 201 I. Teori Administrasi. Jakarta. Penerbit Universitas Terbuka

Thoha, Mifta 1983. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Univerasitas Gajah Marla. Penerbit PT RajaGrapindo Persada

Wasistiono, Sadu. 2002. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung. Penerbit Alqaprint Jatinangor.

Widjaja, Haw. Otonomi Daeruh dan Daerah Oronom. 2001. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. Good Go\·ernance. 2001. Sidoarjo. Penerbit Insan Cendekia.

Wisakti, Daru. 2008. lmplementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Ji fVi!ayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan. Universitas Diponegoro Semarang·

Yin, Robert K. 2002. Studi Kasus (Desain dan Metode). Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Dokumen - dokumen :

Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang- undang Nomor 6 tahuil 2014 ten tang Pemerintahan Desa

Perrnendagri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa

Internet

http://dunia-penelitian.blogspot .com/

http://slideshare.net/ materikuliah/

http://slideshare.net/raaz5001/kuliah-3-teori-sistem

http://lumbungkomunitas.net/20 13/04/desa-dan-otoritas-negara/

wikipedia.org/wiki/Desa

www.forurndesa.org

http://glekhoba.blogspot.com